

## **IMPLEMENTASI PEMBERIAN HIBAH OLEH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS: KECAMATAN DANAU PANGGANG)**

**Haikal Ihsan Akmal<sup>1</sup>, Jumaidi<sup>2</sup>, Ahmad Baihaqi<sup>3</sup>**

Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
Email: haekalikhsan21@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi fenomena yaitu: *Pertama*, Minimnya sosialisasi dan informasi mengenai program pemberian hibah di masyarakat. *Kedua*, Minimnya Sumber Daya Manusia pengelola program pemberian hibah. *Ketiga*, Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk program pemberian hibah. Adapun tujuan penelitian adalah mengetahui Implementasi Pemberian Hibah Oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Kecamatan Danau Panggang) dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deksriptif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil secara *purposive sampling* sebanyak 13 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pemberian Hibah Oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Kecamatan Danau Panggang) cukup efektif diukur melalui model George C. Edward III dalam Leo Agustino (2016:136-141) dengan 2 indikator menyatakan kurang, 5 indikator yang menyatakan kurang, dan 2 indikator menyatakan sudah Adapun faktor pendorong yaitu *Pertama* Pembagian wewenang yang sudah tepat; *Kedua* adanya SOP yang dijadikan pedoman oleh semua pegawai. Sedangkan faktor penghambat yaitu *Pertama* Sosialisasi pemberian hibah yang tidak menyeluruh; *Kedua* Tidak adanya rekrutmen formasi CPNS atau PPPK untuk bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra); *Ketiga* Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah untuk program pemberian hibah. Saran ditujukan kepada Sekretaris Daerah agar mempertimbangkan penambahan jumlah pegawai pada bagian (Kesra) dan juga meningkatkan alokasi anggaran untuk Program Pemberian Hibah. Kepada Pegawai Bagian (Kesra) disarankan agar kegiatan sosialisasi tidak hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Kepada masyarakat supaya lebih memperhatikan penyampaian informasi pada sosialisasi yang telah diselenggarakan.

**Kata Kunci:** Implementasi Pemberian Hibah, Sumber Daya Manusia, Sosialisasi Program

### **ABSTRACT**

*This research is based on the phenomenon of: Firstly, the lack of socialization and information regarding grant distribution programs in the community. Secondly, the lack of human resources managing the grant distribution programs. Thirdly, the limited budget allocated for grant distribution programs. The aim of the research is to understand the implementation of grant distribution by the Regional Secretariat of Hulu Sungai Utara Regency (Case Study: Danau Panggang District) and to identify the influencing factors. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data sources were selected purposively from 13 individuals. Once the data was collected, it was analyzed using Data Reduction, Data Presentation, Conclusion Drawing, and Verification techniques. The results of this study indicate that the implementation of grant distribution by the Regional Secretariat of Hulu Sungai Utara Regency (Case Study: Danau Panggang District) is quite effective when measured using George C. Edward III's model in Leo Agustino (2016:136-141), with 2 indicators indicating insufficient performance, 5 indicators showing weaknesses, and 2 indicators indicating satisfactory performance. The driving factors include: First, the appropriate distribution of authority; Second, the existence of Standard Operating Procedures (SOP) that serve as guidelines for all employees. Meanwhile, the hindering factors are: First, the lack of comprehensive socialization of grant distribution; Second, the absence of recruitment for civil servant formations or PPPK for the Community Welfare section; Third, the low capacity of Local Revenue (PAD) for grant distribution programs. The suggestion is directed to the*

*Regional Secretary to consider increasing the number of employees in the (Kesra) section and also to increase the budget allocation for the Grant Provision Program. It is recommended for the employees of the (Kesra) section that the socialization activities should not only be conducted once a year. The public is urged to pay more attention to the information presented during the socialization that has been held..*

**Keyword:** *Grant Distribution Implementation, Human Resource Limitations, Program Socialization*

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah merupakan sebuah kesempatan sekaligus tantangan bagi wilayah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi penduduknya. Dengan demikian, otonomi daerah memberikan peluang bagi setiap wilayah untuk bersaing dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik, menyusun kebijakan yang tepat, dan mengembangkan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan harus menyasar langsung dan memberikan efek positif bagi kemajuan masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan publik adalah hak yang dimiliki oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan intervensi dalam kehidupan masyarakat. Tindakan ini diambil supaya kehidupan masyarakat berjalan dengan teratur, aman, dan sejahtera. Singkatnya, meskipun penerapan suatu kebijakan terlihat seperti suatu intervensi, langkah tersebut diperbolehkan karena didasari oleh aturan yang jelas, meskipun tidak semua kebijakan publik dapat memenuhi semua harapan dan kepentingan masyarakat.

Pemberian hibah merupakan instrumen strategis dalam kerangka kebijakan publik dan bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan, inovasi sosial, serta penguatan ekosistem pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks akademis, program ini dapat dipahami sebagai mekanisme transfer finansial yang bersifat non-komersial dari suatu entitas pemberi hibah kepada penerima hibah, dengan tujuan spesifik untuk mendukung realisasi proyek atau inisiatif yang selaras dengan prioritas pembangunan, riset ilmiah, atau pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, yang merupakan perubahan dari Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 mengenai Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Menindaklanjuti regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Perbup Nomor 51 Tahun 2020, yang memuat pedoman teknis terkait pemberian hibah dan bantuan sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tujuan utama program hibah adalah menciptakan pengaruh lain melalui alokasi sumber daya finansial kepada aktor-aktor non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, kelompok komunitas, atau individu peneliti, yang memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan sosial, ekonomi, atau lingkungan namun terkendala oleh keterbatasan anggaran. Hibah berfungsi sebagai katalisator dalam mempercepat pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan akses Pendidikan berkualitas, atau mitigasi perubahan iklim.

Secara struktural, program hibah dirancang untuk memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan meritokrasi. Proses seleksi penerima hibah umumnya melibatkan evaluasi komprehensif terhadap proposal yang diajukan, dengan parameter penilaian seperti relevansi tujuan, metodologi implementasi, potensi dampak jangka panjang, serta kapasitas kelembagaan penerima.

Mekanisme ini menjamin bahwa dana dialokasikan secara efisien kepada entitas yang memiliki kompetensi teknis dan komitmen operasional untuk merealisasikan program secara optimal.

Melalui program ini, Sekretariat Daerah berupaya menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan memberikan dukungan finansial, diharapkan berbagai kegiatan yang diajukan dapat terlaksana dengan baik, mulai dari program pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi lokal. Pendanaan ini bukan hanya sekadar bantuan, tetapi juga menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat agar lebih aktif dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah mereka.

Sasaran dari program ini adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, serta meningkatkan kapasitas organisasi lokal. Dengan adanya dana hibah, diharapkan kelompok-kelompok masyarakat dapat mengembangkan inovasi dan solusi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memperkuat jaringan antar organisasi, sehingga tercipta kolaborasi yang lebih baik dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, setiap proposal yang diajukan akan melalui proses seleksi yang ketat, dengan mempertimbangkan relevansi, dampak, dan keberlanjutan dari proyek yang diusulkan. Dengan demikian, Sekretariat Daerah tidak hanya memberikan dana, tetapi juga memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dengan pemberian hibah ini, diharapkan tercipta iklim yang kondusif bagi pertumbuhan inisiatif lokal, serta mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada di tingkat masyarakat. Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat, visi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud. Dengan adanya dana hibah dari kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Namun berdasarkan fakta dilapangan bahwa masih banyak tempat ibadah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang belum mengetahui tentang adanya pemberian hibah yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang pemberian hibah. Kurangnya sosialisasi tersebut juga berdampak pada pengetahuan masyarakat dalam membuat proposal pengajuan dana hibah. Selain itu SOP atau standar operasional prosedur dan proses pencairan dana yang memerlukan waktu lama juga menjadi masalah pada pemberian hibah ini. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah, khususnya bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kompleksnya permasalahan dalam kebijakan pemberian bantuan dana hibah tertuang dalam fenomena-fenomena sebagaimana terurai berikut ini. *Pertama*, Minimnya sosialisasi dan informasi mengenai program pemberian hibah di masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara, terkhususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Danau Panggang. Sehingga terdapat masyarakat yang masih belum memahami dengan jelas mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan proposal. *Kedua*, Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang membuat program pemberian hibah kurang berjalan maksimal. *Ketiga*, Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk program pemberian hibah oleh bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang menyebabkan adanya pemangkasan dana proposal.

Berdasarkan hal ini, penulis tertarik meneliti tentang " Implementasi Pemberian Hibah Oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Kecamatan Danau Panggang)". Beberapa pertanyaan yang muncul adalah Implementasi Pemberian Hibah Oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Kecamatan Danau Panggang) dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi nya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pemberian Hibah Oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Kecamatan Danau Panggang) dan faktor-faktor yang mempengaruhi, serta memberikan manfaat dalam perbaikan implementasi kebijakan di Kecamatan Danau Panggang.

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Pertama, Rinda Unawi (2021) dari Universitas Medan Area, yang mengadakan penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara". Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi yang mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan Kebijakan Pemberian Dana Hibah sudah sesuai dengan Permendagri NO. 32 Tahun 2011, tetapi proses hanya sampai pada tahap pembuatan dan pengajuan proposal. Namun, dalam realisasinya menuju kesempurnaan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini meliputi aspek internal dan eksternal, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan Struktur Birokrasi, yang masih berpengaruh besar terhadap jalannya proses implementasi. Kedua, penelitian oleh Juhri, Dafyar Eliadi H, dan Edi Mulyadi (2023) dari Universitas Islam Syekh Yusuf dengan judul "Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Dana Hibah Keagamaan Di Kota Tangerang (Studi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tangerang)". Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan pemberian hibah telah dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat kebutuhan untuk mengoptimalkan komunikasi kebijakan, sumber daya yang tersedia, disposisi kebijakan, dan struktur birokrasi yang terlibat. Pelaksanaan kebijakan bantuan dana hibah memerlukan komunikasi dan koordinasi yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Salah satu cara untuk melakukan koordinasi dan komunikasi tersebut adalah melalui sosialisasi sebelum pencairan hibah keagamaan, saat pencairan hibah, serta setelah pencairan hibah. Dengan demikian, penggunaan dan pengelolaan dana hibah yang diterima oleh organisasi keagamaan dapat diawasi, dipantau, dan dievaluasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tangerang.

Tinjauan teoritis dalam penelitian ini adalah Menurut Mazmanian dan P. A. Sabatier (dalam Rahayu Kusuma Dewi, 2016:154-155), mengemukakan bahwa implementasi adalah Mengetahui dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan efektif atau disusun merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu "peristiwa dan aktivitas yang muncul setelah disetujuinya panduan kebijakan nasional yang melibatkan upaya untuk mengelola serta menghasilkan efek atau pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat atau kegiatan dan program yang sedang atau akan dilaksanakan". Menurut Udoji (dalam Intan Fitria Meutia, 2017:86) Implementasi bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya berupa impian atau rencana yg bagus dan tersimpan dalam arsip kalau tak diimplementasikan. Menurut Winarno (dalam Abdal, 2015:112) implementasi adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik.

Implementasi merupakan tahap kebijakan antara penciptaan program dan dampak kebijakan terhadap masyarakat yang terkena pengaruhnya. Jika suatu program tidak sesuai atau tidak dapat menanggulangi masalah yang menjadi tujuan kebijakan, maka program tersebut mungkin akan gagal meskipun pelaksanaannya dilakukan dengan baik, sedangkan program yang sangat baik juga dapat melulu gagal jika pelaksanaannya tidak dilakukan dengan optimal.

. Menurut Grindle (dalam Irawaty Igrisa, 2022:56) Implementasi kebijakan Sebenarnya, hal ini tidak hanya berkaitan dengan cara menerjemahkan keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui jalur birokrasi, tetapi lebih dari itu, berhubungan dengan isu konflik, keputusan, dan pihak mana yang mendapatkan manfaat dari suatu kebijakan. Menurut Jones Charles O. (dalam Reno Affrian, 2023) implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengoperasikan suatu program dengan melihat tiga aktivitas utama, yakni organisasi, interpretasi, dan penerapan (aplikasi).

Menurut Warwic (dalam Reno Affrian, 2023) mengemukakan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh organisasi, informasi yang tersedia, dukungan-dukungan, dan pembagian potensi.

Penelitian ini mengacu pada model pendekatan Implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam Leo Agustino (2016:136-141). George C. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoremdkan oleh George C. Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:. Adapun aspek-aspek implementasi menurut teori George C. Edward III dalam Leo Agustino (2016:136-141) yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

Pemberian hibah merupakan instrumen strategis dalam kerangka kebijakan publik dan bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan, inovasi sosial, serta penguatan ekosistem pembangunan berkelanjutan. Tujuan utama program hibah adalah menciptakan pengaruh lain melalui alokasi sumber daya finansial kepada aktor-aktor non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, kelompok komunitas, atau individu peneliti, yang memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan sosial, ekonomi, atau lingkungan namun terkendala oleh keterbatasan anggaran. Hibah berfungsi sebagai katalisator dalam mempercepat pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan akses Pendidikan berkualitas, atau mitigasi perubahan iklim.

## **METODE**

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami berbagai fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, serta pandangan dan sikap individu maupun kelompok. Pendekatan kualitatif berakar pada paradigma post-positivisme dan digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alami, berbeda dengan pendekatan eksperimental. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi atau kombinasi berbagai sumber, analisis data bersifat induktif, dan fokus utama dari hasil penelitian adalah pada pemaknaan terhadap suatu situasi, bukan pada generalisasi hasil.(Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan pendekatan penelitian yang mengandalkan data berupa uraian dalam bentuk kata-kata, baik lisan maupun tulisan, yang berasal dari individu atau subjek yang diamati secara

langsung. Menurut Sugiyono dalam (I Made Sudarma, et.al. 2021:45) Metode deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menguraikan atau mengevaluasi hasil penelitian tanpa bertujuan melakukan generalisasi yang luas. Penelitian dengan metode ini difokuskan untuk memberikan gambaran atau deskripsi yang akurat mengenai suatu kondisi atau situasi yang bersifat objektif.

Adapun data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau didapatkan dari data kepustakaan seperti buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fenomena permasalahan penelitian. Sumber data dari penelitian ini sesuai dengan teknik pemakaian sumber data utama sebagai informan yaitu menggunakan teknik penarikan sumber data adalah *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik untuk pengumpulan data yang didapatkan dengan mengambil sebagian dari jumlah populasi atau keseluruhan dari sumber data yang ada untuk melakukan pertimbangan yang didasari oleh informasi yang telah ada dan sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan sehingga informasi yang didapatkan dari perwakilannya dapat diterima bisa dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 13 orang sebagai informan. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara, observasi dan dokumentasi.

Proses analisis data dapat dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu 1) *Reduksi Data*. 2) *Penyajian Data*, 3) *Penarikan Kesimpulan/Verifikasi*. Oleh karena itu, peneliti harus menyadari bahwa dalam menggali makna, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan emik yakni melihat dari sudut pandang informan kunci bukan berdasarkan penafsiran pribadi peneliti atau pendekatan etik. (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2017:135). Miles and Huberman dalam Sugiyono (2019:321) menyatakan ada 3 tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data, yaitu: proses pengumpulan, reduksi dan penyajian data. Kemudian untuk mengevaluasi kredibilitas data digunakan beberapa metode seperti perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan referensi, serta melakukan member check.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan dengan menggunakan variabel dan indikator Implementasi Kebijakan sesuai dengan teori George C. Edward Edward III dalam buku Leo Agustino (2016:136-141) yaitu sebagai berikut :

### 1. Komunikasi

Transmisi atau penyampaian komunikasi yang efektif dapat menghasilkan pelaksanaan yang berkualitas. Seringkali, dalam proses penyampaian komunikasi, muncul kesalahpahaman (miskomunikasi), yang terjadi karena komunikasi telah melalui berbagai lapisan birokrasi, sehingga apa yang diinginkan menjadi terdistorsi di tengah proses. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penyaluran informasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif dikarenakan adanya sosialisasi ke masyarakat disetiap tahunnya. Tapi, tidak semua masyarakat menerima sosialisasi tersebut dan masyarakat yang mendapatkan informasi mengenai pemberian hibah hanya mengetahui nama programnya saja namun tidak mengetahui secara jelas syarat pengajuannya. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa penyaluran informasi mengenai pemberian hibah cukup efektif dikarenakan sosialisasi hanya diadakan sekali setahun dan hanya dilakukan ditempat tertentu sehingga masih banyak masyarakat yang mengajukan hibah belum mengetahui syarat dan batas waktu pengajuan

proposal hibah. Berdasarkan hasil dokumentasi dapat diketahui bahwa penyaluran informasi mengenai pemberian hibah cukup efektif dikarenakan sosialisasi atau penyaluran informasi secara langsung hanya dilakukan sekali dalam setahun di Kecamatan Danau Panggang dan peserta sosialisasi terbatas. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa penyaluran informasi mengenai pemberian hibah cukup efektif dikarenakan sosialisasi hanya diadakan satu kali dalam setahun sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui dengan jelas mengenai prosedur dan persyaratan yang diperlukan untuk melakukan pengajuan proposal pemberian hibah ini. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa cukup sesuai dengan pendapat George C. Edward III, karena penyampaian informasi yang dilakukan kurang terimplementasi secara menyeluruh sehingga masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui terkait adanya pemberian hibah dan kurang memahami dengan jelas tentang prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan proposal pemberian hibah yang dikelola oleh bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Informasi atau komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan di tingkat bawah harus disampaikan dengan jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Meskipun pesan kebijakan yang kurang jelas tidak selalu sepenuhnya menghambat proses implementasi, namun kejelasan tetap diperlukan agar para pelaksana dapat memahami dan menjalankan kebijakan dengan tepat, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan isi kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi pemberian hibah kurang efektif dikarenakan masih ada masyarakat yang belum memahami tentang persyaratan dan prosedur pengajuan proposal hibah. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa kejelasan informasi pemberian hibah kurang efektif dikarenakan Sebagian masyarakat yang pada saat mengajukan proposal ternyata masih belum lengkap persyaratannya ataupun proposal tersebut belum sesuai dengan prosedur yang semestinya. Berdasarkan hasil dokumentasi hibah cukup efektif dikarenakan pada SOP Pelayanan Permohonan Kegamaan/Sosial/Pendidikan, persyaratan proposal pengajuan dana hibah diberikan penjelasan secara singkat kepada masyarakat. Pada saat sosialisasi telah diberikan apa saja persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan proposal hibah, namun masih ada masyarakat yang kurang memahami persyaratan tersebut sehingga pada saat pengajuan proposal terkadang masih ada berkas yang kurang lengkap dan kurang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi disimpulkan bahwa kejelasan informasi yang diberikan oleh bagian Kesra mengenai pemberian hibah kurang efektif dikarenakan bagian Kesra telah menjelaskan secara singkat mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan hibah akan tetapi masih ada masyarakat yang kurang memahami informasi yang telah diberikan sehingga pada saat pengajuan proposal terkadang masih ada berkas yang kurang lengkap persyaratannya dan tidak sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kejelasan informasi mengenai pemberian hibah ini kurang efektif. Dimana hal terkait informasi sudah diinformasikan ke masyarakat akan tetapi belum optimal, karena hanya mengandalkan sosialisasi satu kali sosialisasi di satu tempat dalam setahun. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka kurang sesuai dengan pendapat George C. Edward III, bahwa kejelasan dalam menyampaikan informasi yang dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) kurang efektif.

## 2. Sumber Daya

Staf, sumber daya utama dalam penerapan kebijakan adalah karyawan atau sumber daya manusia (SDM). Salah satu penyebab umum dari kegagalan dalam penerapan kebijakan adalah kurangnya jumlah staf, ketidakcukupan, atau kurangnya kompetensi di area yang relevan. Menambahkan jumlah staf atau pelaksana saja tidak cukup, melainkan juga penting untuk memastikan staf memiliki keahlian dan kemampuan yang sesuai (kompeten dan mampu) dalam menerapkan kebijakan atau melakukan tugas yang ditugaskan oleh kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa jumlah staf/tenaga kerja yang ada di bagian Kesra masih kurang efektif mengingat masih banyak kegiatan besar lainnya selain dari pemberian hibah yang ditangani oleh bagian Kesra yang mengharuskan banyak orang. Sehingga kurang terimplementasi dikarenakan beberapa penerima hibah yang harusnya dilakukan monitoring malah tertunda disebabkan adanya kegiatan lain yang harus ditangani dan jumlah pegawai yang kurang sehingga tidak bisa dilakukan monitoring. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa jumlah staf atau tenaga kerja yang ada di bagian Kesra cukup efektif karena kegiatan pemberian hibah ini masih bisa berjalan sampai sekarang namun karena masih banyak kegiatan besar lainnya selain dari pemberian hibah sehingga kadang monitoring hibah tertunda. Berdasarkan hasil dokumentasi hibah kurang efektif dikarenakan jumlah pegawai pada data kepegawaian bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi disimpulkan bahwa jumlah staf/tenaga kerja yang ada di bagian Kesra dalam menunjang mengenai pemberian hibah kurang efektif dikarenakan biasanya ada SOP yang terlewatkan seperti monitoring karena padatnya kegiatan yang ditangan oleh bagian Kesra dan terbatas oleh jumlah pegawai yang sedikit. Karena untuk di bagian Kesra ini Cuma ada 8 orang dan itupun sudah termasuk dengan Kabag yang mana seharusnya untuk bagian Kesra ini minimal paling sedikit itu pegawainya sebanyak 15 orang sebagaimana berdasarkan usulan di Analisa Jabatan agar bisa menunjang seluruh kegiatan yang ada di bagian Kesra bukan hanya pemberian. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan pula bahwa kurang sesuai dengan pendapat George C. Edward III, yang mana dalam teorinya salah satu variabel yang mempengaruhi suatu implementasi adalah sumber daya manusia. Implementasi bisa mengalami kegagalan dikarenakan jumlah pegawai yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak berkompeten dibidangnya.

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Pelaksana mungkin memiliki jumlah staf yang cukup, memahami apa yang perlu dilakukan, dan mempunyai kekuasaan untuk menjalankan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas yang mendukung (alat dan infrastruktur), maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan berhasil.. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di bagian Kesra sudah efektif dan memadai untuk menunjang kegiatan pemberian hibah yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang ada di bagian Kesra sudah efektif dan memadai untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pemberian hibah sehingga bisa terimplementasi dengan baik, walaupun ada kendala itu biasanya dari faktor eksternal seperti mati Listrik atau aplikasi yang digunakan error. Berdasarkan hasil dokumentasi hibah sudah efektif dikarenakan pada data inventaris barang bahwa sarana prasarana yang ada

pada bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) telah memadai untuk melakukan kegiatan pemberian Hibah. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di bagian Kesra sudah efektif dan memadai untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pemberian hibah sehingga bisa terimplementasi dengan baik dan memberikan kemudahan untuk pegawai dalam bekerja sehingga pekerjaan lebih cepat selesai. Berdasarkan hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan pendapat George C. Edward III, yang mana dalam teorinya salah satu variabel yang mempengaruhi suatu implementasi adalah fasilitas. Dengan adanya fasilitas yang memadai maka proses implementasi pun akan lebih mudah dan bisa terjamin berhasil.

Finansial atau anggaran sangat penting, Dengan adanya anggaran, proses pelaksanaan dapat berlangsung dengan lancar. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Finansial/Anggaran yang ada digunakan untuk menunjang kegiatan pemberian hibah yang dilaksanakan ini cukup efektif karena bisa menunjang kegiatan pemberian hibah namun karena hanya menggunakan dana APBD, sehingga proposal pengajuan hibah juga terbatas. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa Pendanaan kegiatan pemberian hibah cukup efektif karena pendanaan sepenuhnya bersumber dari APBD yang nantinya digunakan sebagai operasional Bagian Kesra dan Pemberian Hibah. Karena pendanaan kegiatan pemberian hibah sepenuhnya bersumber dari APBD yang terbatas sehingga biasanya ada pangkasan atau proposal yang lebih urgent akan didahulukan. Berdasarkan hasil dokumentasi hibah diketahui bahwa Pendanaan kegiatan pemberian hibah cukup efektif karena anggaran atau pendanaan sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 51 Tahun 2020 Pasal 4 Ayat 2. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi Finansial/Anggaran yang ada cukup efektif karena untuk menunjang kegiatan pemberian hibah yang dilaksanakan ini hanya menggunakan dana APBD. Oleh karena itu biasanya dana APBD yang terbatas maka akan ada pangkasan pada proposal yang lebih urgent akan didahulukan. Berdasarkan hasil di atas maka dapat disimpulkan pula bahwa cukup sesuai dengan pendapat George C. Edward III, yang mana dalam teorinya salah satu variabel yang mempengaruhi suatu implementasi adalah finansial atau anggaran. Melalui anggaran yang tercukupi maka dalam proses implementasi pun akan berjalan dengan lancar, baik untuk menunjang pekerjaan ataupun yang lainnya.

### 3. Disposisi

Umumnya, suatu kewenangan perlu bersifat resmi agar instruksi dapat dijalankan. Kewenangan adalah hak atau pengakuan bagi para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan melalui proses politik. Apabila kewenangan tidak ada, maka kekuatan para pelaksana di hadapan masyarakat tidak memiliki legitimasi, yang dapat menghambat proses pelaksanaan kebijakan. Namun, dalam situasi lain, ketika kewenangan resmi tersebut ada, sering kali terjadi kesalahan dalam menilai efektivitas kewenangan. Di satu sisi, efektivitas kewenangan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan; namun di sisi lain, efektivitas dapat berkurang apabila kewenangan disalahgunakan oleh para pelaksana untuk kepentingan pribadi mereka atau kelompok tertentu. Berdasarkan hasil wawancara mengenai jumlah wewenang maka dapat disimpulkan bahwa untuk pembagian wewenang di Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sudah efektif.

Dan untuk pembagiannya itu sudah sesuai dengan masing-masing kemampuan pegawainya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan di bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) terkait wewenang itu sudah efektif, adanya terdapat pembagian wewenang yang sudah ditentukan dan juga tiap pegawainya melaksanakan dengan baik masing-masing wewenang tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), peneliti menyimpulkan bahwa terkait wewenang di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sudah efektif. Yang mana sudah terdapat pembagian wewenang yang dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sesuai dengan kemampuan pegawainya dengan tepat. Hal ini sudah sesuai dengan pendapat George C. Edward III, yang mana dalam teorinya salah satu variabel yang mempengaruhi suatu implementasi adalah wewenang. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sudah di sususun dan di tetapkan wewenang untuk tiap pengelola atau pegawainya.

Fragmentasi dilakukan dengan tujuan membagi tanggung jawab berbagai kegiatan atau program ke dalam unit-unit kerja yang sesuai dengan keahliannya. Dengan struktur birokrasi yang terbagi seperti ini, pelaksanaan kebijakan akan berjalan lebih efisien karena dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang sesuai.. Berdasarkan hasil wawancara mengenai komitmen atau tanggung jawab maka dapat disimpulkan bahwa untuk tanggung jawab dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) cukup efektif , dilihat dari komitmen mereka untuk mengelola program pemberian hibah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) terkait tanggung jawab, sudah cukup efektif. Bagian Kesra sangat memperhatikan dan berusaha semaksimal mungkin dalam mengelola pemberian hibah. Walaupun kadang fakta dilapangan ada sedikit yang berbeda maka harus disesuaikan juga supaya bisa sesuai antara proposal yang diajukan dengan laporan pertanggung jawaban nantinya. Berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), peneliti menyimpulkan bahwa terkait komitmen atau tanggung jawab di Bagian Kesra cukup efektif . Yang mana dari Bagian Kesra selalu berusaha secara maksimal untuk mengelola program pemberian hibah. Hal ini cukup sesuai dengan pendapat George C. Edward III, yang mana dalam teorinya salah satu variabel yang mempengaruhi suatu implementasi adalah tanggung jawab. Apabila implementor memiliki tanggung jawab yang baik maka dia akan dapat menjalankannya dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

#### 4. Struktur Birokrasi

Salah satu elemen penting dalam struktur organisasi adalah keberadaan standar prosedur operasional (SOP) yang menjadi acuan bagi pegawai dalam menjalankan tugas implementasi. Berdasarkan hasil observasi cukup efektif dikarenakan program pemberian hibah sudah terdapat SOP namun dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan SOP seperti hanya sebagian penerima hibah yang mendapatkan monitoring dari pegawai Kesra. Berdasarkan hasil dokumentasi sudah efektif dikarenakan terdapat SOP dalam penyusunan Permohonan Bantuan Dana Hibah Keagamaan/Sosial/Pendidikan pada bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa prosedur operasional standar (SOP) dalam pelaksanaan

pemberian dana hibah di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif. Namun, dalam praktiknya di lapangan masih ditemukan ketidaksesuaian dengan SOP yang berlaku, seperti belum semua proposal memenuhi syarat sejak awal dan masih perlunya revisi, serta kegiatan monitoring yang belum menjangkau seluruh penerima hibah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara administratif SOP telah tersedia dan digunakan, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar lebih konsisten dan menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian diatas cukup sesuai dengan pendapat George C. Edward III, yang mana dalam teorinya salah satu variabel yang mempengaruhi suatu implementasi adalah tanggung jawab. Apabila implementor memiliki tanggung jawab yang baik maka dia akan dapat menjalankannya dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Jika koordinasi tidak berjalan sejalan dengan kebijakan yang telah dirancang oleh pemangku kepentingan tingkat atas, maka hal tersebut dapat menimbulkan kendala nyata dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh sebab itu, sistem koordinasi harus mengikuti aturan yang berlaku, serta memperhatikan kepentingan masyarakat secara lebih khusus. Oleh karena itu, mekanisme koordinasi kebijakan haruslah sesuai aturan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan dalam pengelolaan Pemberian Hibah oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif dikarenakan dalam pelaksanaannya sesuai dengan SOP walaupun biasanya proposal yang diajukan masih tidak sesuai dengan SOP dan kurang lengkap persyaratannya. Berdasarkan hasil observasi cukup efektif karena pada pelaksanaan program pemberian hibah itu berdasarkan dengan SOP yang telah disahkan oleh Sekretaris Daerah. Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) memiliki SOP yang sudah ditentukan dan dijadikan pedoman bagi semua pegawai dalam melakukan tugasnya, walaupun adakalanya pada saat penerapan di lapangan ada penyesuaian dengan kondisi yang ada dengan acuan tetap berdasarkan dengan prosedur operasional standar (SOP). Berdasarkan hasil dokumentasi sudah efektif dikarenakan dalam pelaksanaan program pemberian hibah berdasarkan dengan SOP pelayanan permohonan bantuan dana hibah Keagamaan/Sosial/Pendidikan pada bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan dalam pengelolaan pemberian hibah oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif karena sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. SOP tersebut telah disahkan oleh Sekretaris Daerah dan menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam menjalankan tugasnya. Meskipun dalam praktik di lapangan terdapat penyesuaian terhadap kondisi tertentu, pelaksanaan tetap mengacu pada SOP yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian diatas hal ini cukup sesuai dengan pendapat George C. Edward III, yang mana dalam teorinya salah satu variabel yang mempengaruhi suatu implementasi adalah dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan setelahnya sangat penting untuk membantu melihat apakah setelahnya kegiatan bisa berjalan dengan baik dan juga efisien.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Pemberian Hibah Oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Kecamatan Danau Panggang) meliputi faktor penghambat dan faktor pendukung:

## 1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah segala bentuk kendala, hambatan, atau tantangan yang mengganggu atau memperlambat proses pelaksanaan suatu kebijakan. Pada Implementasi Pemberian Hibah Oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Kecamatan Danau Panggang), faktor penghambat dapat muncul dari aspek internal dan aspek eksternal.

### a. Sosialisasi pemberian hibah yang tidak menyeluruh

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mengenai pemberian hibah ini masih belum menyeluruh karena hanya disampaikan kepada aparat desa atau beberapa perwakilan dari lembaga keagamaan dan Yayasan. Lalu sosialisasi hanya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun di Kecamatan Danau Panggang sehingga kejelasan informasi mengenai berkas proposal yang diajukan oleh masyarakat biasanya masih belum lengkap persyaratannya dan kurang sesuai dengan SOP yang seharusnya sehingga masyarakat masih harus memperbaiki lagi proposalnya dan melengkapi berkas persyaratan. Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami prosedur dan persyaratan dalam pengajuan proposal hibah, walaupun sebelumnya sudah diadakan sosialisasi. Hal ini menyebabkan berkas yang diajukan sering kali belum lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam SOP. Akibatnya, masyarakat perlu melakukan perbaikan dan melengkapi kembali dokumen proposal sebelum dapat diproses lebih lanjut. Temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan sosialisasi dan bimbingan terkait prosedur pengajuan hibah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak masyarakat yang belum memahami dengan jelas mengenai prosedur pengajuan proposal dan persyaratan-persyaratannya yang menyebabkan proposal yang diajukan masih ada kesalahan ataupun kurang lengkap berkas persyaratannya.

### b. Tidak adanya rekrutmen formasi CPNS atau PPPK untuk bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa keterbatasan jumlah pegawai di bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) berdampak pada pelaksanaan kegiatan pemberian hibah yang mana ini disebabkan karena belum adanya formasi CPNS atau PPPK yang dibuka untuk bagian Kesra. Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa terbatasnya tenaga kerja yang bertugas dalam penginputan proposal ke sistem aplikasi juga berdampak langsung pada efisiensi kerja. Karena kekurangan personel, proses tersebut tidak dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan, sehingga memicu terjadinya keterlambatan yang berulang. Kondisi ini disebabkan oleh tidak adanya rekrutmen pegawai untuk bagian Kesra. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan jumlah SDM yang menangani proses input proposal ke aplikasi agar bisa lebih cepat. Berdasarkan hasil penelitian di atas hal ini kurang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III, karena pada aspek faktor yang mempengaruhi program. Keterbatasan jumlah SDM pada bagian Kesra menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberian hibah.

### c. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah untuk program pemberian hibah

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa keterbatasan anggaran APBD yang dialokasikan untuk program pemberian hibah yang disebabkan oleh PAD yang rendah sehingga proposal yang diajukan biasanya akan ada pemangkasan bahkan bisa juga ditunda ketahun berikutnya. Hal ini berdampak pada berkurangnya jumlah penerima manfaat program pemberian hibah. Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa dalam proses pertimbangan rekomendasi hibah mengalami hambatan signifikan dalam pelaksanaan program pemberian imbalan ini yaitu minimnya alokasi dana yang disediakan dalam APBD, yang menjadi satu-satunya sumber pembiayaan program tersebut. Karena dana yang tersedia sangat terbatas dan tidak fleksibel, maka ketika jumlah proposal yang diajukan melebihi kapasitas keuangan daerah, pemerintah harus melakukan seleksi ketat dan pemangkasan terhadap besaran dana yang diajukan. Dalam kondisi tertentu, apabila proposal yang masuk terlalu banyak, sebagian di antaranya tidak dapat langsung diproses dan pencairannya harus dijadwalkan ulang ke tahun anggaran berikutnya, menyesuaikan dengan ketersediaan dana. Berdasarkan hasil penelitian diatas hal ini kurang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III, karena pada aspek faktor yang mempengaruhi program. Anggaran dana yang dialokasikan untuk program pemberian hibah sehingga ada pemangkasan dana dari proposal yang diajukan bahkan ada proposal yang ditunda setahun berikutnya.

## 2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan segala bentuk kondisi, kebijakan, maupun peran dari pihak-pihak terkait yang membantu memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan atau peraturan. Dalam konteks Implementasi Pemberian Hibah Oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Kecamatan Danau Panggang), Faktor pendukung dapat berasal dari internal maupun eksternal.

### a. Pembagian wewenang yang sudah tepat

Berdasarkan hasil wawancara mengenai jumlah wewenang maka dapat disimpulkan bahwa untuk pembagian wewenang di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sudah sesuai. Dan untuk pembagiannya itu sudah sesuai dengan masing-masing kemampuan pegawainya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) terkait wewenang itu sudah baik, adanya terdapat pembagian wewenang yang udah ditentukan dan juga tiap pegawainya melaksanakan dengan baik masing-masing wewenang tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), peneliti menyimpulkan bahwa terkait wewenang di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) tergolong optimal. Yang mana sudah terdapat pembagian wewenang yang dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sesuai dengan kemampuan pegawainya dengan tepat. Berdasarkan hasil penelitian diatas hal ini sudah sesuai dengan pendapat George C. Edward III, yang mana dalam teorinya salah satu variabel yang mempengaruhi suatu implementasi adalah wewenang. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sudah di sususun dan di tetapkan wewenang untuk tiap pengelola atau pegawainya.

### b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan pedoman oleh semua pegawainya

Berdasarkan hasil wawancara mengenai SOP maka dapat disimpulkan bahwa untuk SOP dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sudah baik, dilihat dari SOP yang dijadikan pedoman bagi semua pegawai yang ada di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dalam melakukan pekerjaannya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) terkait SOP sudah baik. Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) memiliki SOP yang sudah ditentukan dan dijadikan pedoman bagi semua pegawai dalam melakukan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), peneliti menyimpulkan bahwa terkait SOP di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) tergolong optimal. Yang mana dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) selalu berpedoman kepada SOP yang sudah ditetapkan dalam melakukan tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian diatas hal ini sudah sesuai dengan pendapat George C. Edward III, yang mana dalam teorinya salah satu variabel yang mempengaruhi suatu implementasi adalah SOP (*Standar Operating Prosedures*). SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai di bagian Kesejahteraan Rakyat (Ksera) untuk melaksanakan kegiatan pada tiap harinya itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tersebut.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Pemberian Hibah Oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Kecamatan Danau Panggang) adalah sebagai berikut. Implementasi Pemberian Hibah Oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Kecamatan Danau Panggang) cukup efektif. Dilihat dari indikator *Pertama* Penyaluran informasi terkait program pemberian hibah cukup efektif karena sosialisasi hanya dilakukan sekali setahun, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program tersebut. Kejelasan informasi dari Bagian Kesra terkait pemberian hibah dinilai kurang efektif, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur dengan baik, sehingga berkas proposal yang diajukan sering kali tidak lengkap dan tidak sesuai dengan SOP. *Kedua* Jumlah staf yang terbatas di Bagian Kesra menyebabkan beberapa pelaksanaan SOP, seperti kegiatan monitoring, kurang efektif dengan baik karena padatnya beban kerja yang harus ditangani. Fasilitas di Bagian Kesra sudah efektif untuk pelaksanaan kegiatan pemberian hibah, sehingga mempermudah kerja pegawai dan mempercepat penyelesaian tugas. Finansial/anggaran cukup efektif, karena kegiatan pemberian hibah hanya didanai dari APBD yang terbatas sehingga sering terjadi pemangkasan dana dan prioritas diberikan pada proposal yang lebih mendesak. *Ketiga* Pembagian wewenang di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sudah efektif, karena disesuaikan secara tepat dengan kemampuan masing-masing pegawai. Komitmen dan tanggung jawab di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) cukup efektif, ditunjukkan dengan upaya maksimal dalam mengelola program pemberian hibah. *Keempat* Prosedur operasional standar (SOP) dalam pemberian dana hibah di Bagian Kesra cukup efektif, karena pelaksanaannya di lapangan masih perlu ditingkatkan agar lebih konsisten dan menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur pelaksanaan pemberian hibah di Bagian Kesra Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif dan terstruktur sesuai SOP yang berlaku, meskipun dalam praktiknya tetap menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pemberian Hibah Oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Kecamatan Danau Panggang) terdiri dari faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor penghambat yaitu: Masih banyak masyarakat yang belum memahami secara jelas prosedur dan persyaratan pengajuan proposal, sehingga berkas yang diajukan sering kali tidak lengkap atau mengandung kesalahan. Keterlambatan masyarakat dalam melengkapi persyaratan proposal hibah menjadi kendala utama yang menyebabkan tertundanya proses input ke sistem aplikasi, diperparah oleh kendala teknis dan batas waktu penginputan, sehingga diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat dan perbaikan sistem pendukung. Adanya pemangkasan dana proposal yang diajukan karena terbatasnya anggaran dana yang dialokasikan untuk program pemberian hibah karena program pemberian hibah ini hanya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mana dana ini terbatas karena harus dibagi untuk kegiatan lain seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan lain-lain. Sedangkan untuk faktor pendorongnya yaitu : Pembagian wewenang di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) berjalan optimal dengan penyesuaian tugas sesuai kemampuan pegawai, seperti yang diterapkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) telah menjalankan tugasnya dengan selalu berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan.

Saran ditujukan kepada Sekretaris Daerah agar mempertimbangkan penambahan jumlah pegawai pada bagian (Kesra) dan juga meningkatkan alokasi anggaran untuk Program Pemberian Hibah. Kepada Pegawai Bagian (Kesra) disarankan agar kegiatan sosialisasi tidak hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Kepada masyarakat supaya lebih memperhatikan penyampaian informasi pada sosialisasi yang telah diselenggarakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdal (2015) *Kebijakan Publik Memahami Konsep Kebijakan Publik*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Agustino, L. (2016) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Dewi, R.K. (2016) *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Cv Pustaka Bandung.
- Juhri, D.E.H. and Edi Mulyadi (no date) *Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Dana Hibah Keagamaan Di Kota Tangerang (Studi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tangerang)*.
- Meutia, I.F. (2017) *Analisis Kebijakan Publik*. Bojonegoro: Cv. Anugrah Utama Raharja. Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Unawi, R. (2021) *Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara*.